



Analisis Framing Berita Korupsi di Media Online *Tribun Medan*

Framing Analysis of Corruption News Coverage in *Tribun Medan* Online Media

Nur Ainun Ghoisani Ritonga*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Erwan Effendi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the framing of corruption news in *Tribun Medan* online media during the 2024–2025 period using Robert N. Entman's framing model. The research addresses how corruption is constructed through the dimensions of problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Employing a qualitative descriptive design, data were collected through news text documentation and in-depth interviews with the Law and Criminal Editor of *Tribun Medan* to strengthen data validity through source triangulation. The findings reveal that *Tribun Medan* frames corruption not merely as a legal issue involving state financial losses but also as a social problem affecting public rights and religious facilities. The identified causes emphasize systematic planning manipulation and weak oversight in strategic infrastructure projects. Moral evaluations are articulated through representations of public concern and social accountability toward perpetrators, while recommended solutions focus on judicial transparency and institutional reform within the bureaucracy. The study's novelty lies in its integration of textual framing analysis with editorial perspectives to explain how a local online news outlet constructs corruption narratives within the socio-cultural context of North Sumatra. The findings indicate that *Tribun Medan* performs a watchdog journalism function by fostering public awareness and reinforcing collective social responsibility regarding corruption issues.

ARTICLE HISTORY

Received 05/05/2026

Revised 19/05/2026

Accepted 30/05/2026

Published 10/06/2026

KEYWORDS

Corruption; local journalism; online media; Robert N. Entman framing analysis; *Tribun Medan*.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ nurainunghoisani0603223097@uisu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i1.13627>

PENDAHULUAN

Masalah korupsi di Indonesia tetap menjadi tantangan struktural yang menimbulkan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, meskipun berbagai upaya reformasi birokrasi telah digalakkan. Korupsi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara sistematis merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara (Puanandini et al., 2025). Dalam konteks masyarakat informasi, persepsi publik terhadap skandal korupsi tidak terbentuk secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh narasi yang diproduksi dan didistribusikan oleh media massa. Media online, dengan karakteristik kecepatan dan jangkauan yang luas, memegang peran penting sebagai saluran utama penyebaran informasi sekaligus sebagai instrumen pengawasan sosial (*social watchdog*) (Puanandini et al., 2024; Ramadhani, 2024).

Dinamika korupsi pada tingkat lokal sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus yang berkembang pada level nasional. Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian publik karena berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik dan aparatur sipil negara. Institusi seperti Pemerintah Kota Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hingga berbagai dinas pemerintah daerah kerap menjadi objek pemberitaan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Sofianti & Yusuf, 2025; Sovianti, 2019). Kondisi tersebut menempatkan media lokal pada posisi strategis untuk tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mengonstruksi makna atas peristiwa yang diberitakan bagi masyarakat yang berada dekat dengan konteks sosial dan geografis kasus tersebut.

Tribun Medan sebagai salah satu media online utama di Sumatera Utara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan opini publik di tingkat regional. Melalui proses seleksi, penonjolan, dan penafsiran informasi, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menentukan aspek-aspek tertentu yang memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan aspek lainnya. Fenomena ini sejalan dengan teori konstruksi sosial media yang menjelaskan bahwa realitas yang diterima audiens merupakan hasil proses produksi dan interpretasi yang berlangsung dalam ruang redaksional (Suryasuciramadhan et al., 2024; Susanto, 2021). Dalam konteks jurnalisme digital, karakteristik media lokal tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip profesional jurnalistik, tetapi juga oleh kedekatan geografis, relasi sosial dengan audiens, serta dinamika pasar media lokal. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi cara media membingkai isu korupsi yang terjadi di wilayah pemberitaannya (Kurniati et al., 2025; Nugraha et al., 2022).

Analisis terhadap cara media mengonstruksi berita korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan *framing*. *Framing* merupakan proses seleksi dan penekanan aspek tertentu dari suatu realitas sehingga menjadi lebih menonjol dalam pemberitaan (Bungsu & Muzakir, 2023; Damarrosyidi, 2025). Dalam kajian komunikasi, model *framing* Robert N. Entman banyak digunakan karena menyediakan perangkat analisis yang sistematis melalui empat elemen utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan suatu persoalan, menentukan aktor penyebab, membangun penilaian moral, serta menawarkan solusi atas peristiwa yang diberitakan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji *framing* pemberitaan korupsi pada media nasional, namun penelitian mengenai *framing* korupsi pada media lokal masih relatif terbatas (Siregar, 2025). Padahal, media lokal memiliki karakteristik yang berbeda karena beroperasi dalam lingkungan sosial yang lebih dekat dengan aktor maupun audiens pemberitaan. Kedekatan tersebut berpotensi memengaruhi pola konstruksi berita yang dihasilkan. Studi Ainani dan Hamdie (2025) menunjukkan bahwa pemberitaan korupsi pada media daerah sering kali menampilkan dimensi sosial yang lebih kuat dibandingkan media nasional, yang berimplikasi pada cara publik memahami kasus korupsi yang terjadi di lingkungannya.

Ketergantungan masyarakat Medan terhadap *Tribun Medan* sebagai salah satu sumber informasi utama menjadikan media ini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik mengenai integritas lembaga pemerintahan. Cara suatu instansi direpresentasikan dalam pemberitaan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut (Ariansyah, 2025; Rasiwan, 2025; Setiawan & Harnia, 2021). Pada saat yang sama, *framing* yang proporsional dapat memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme kontrol sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana *Tribun Medan* membingkai pemberitaan korupsi selama periode 2024–2025 melalui empat elemen *framing* Robert N. Entman, serta bagaimana karakteristik media lokal memengaruhi konstruksi pemberitaan tersebut. Penelitian ini menjadi relevan seiring meningkatnya konsumsi berita digital dan semakin besarnya peran media online dalam membentuk persepsi publik terhadap isu korupsi. Melalui analisis *framing* terhadap berita korupsi di *Tribun Medan*, penelitian ini bertujuan mengungkap pola konstruksi realitas korupsi melalui elemen *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*, sekaligus menjelaskan pengaruh karakteristik media lokal terhadap proses seleksi, penonjolan, dan interpretasi informasi dalam konteks jurnalisme digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan utama yang diterapkan adalah analisis *framing* model Robert N. Entman untuk membedah bagaimana realitas mengenai kasus korupsi di lingkungan instansi publik Sumatera Utara dikonstruksi oleh media online. Penggunaan metode kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin menggali makna yang terkandung di balik teks berita, melampaui sekadar frekuensi kemunculan kata, guna memahami kecenderungan konstruksi realitas dan posisi media *Tribun Medan* dalam isu integritas lokal. Analisis ini juga merujuk pada perspektif analisis teks yang memandang berita sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses seleksi, penekanan, dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa.

Subjek penelitian ini adalah media online *Tribun Medan* (medan.tribunnews.com), sedangkan objek penelitian berupa teks pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dipublikasikan selama periode 2024–2025. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih berita-berita utama yang memuat kasus korupsi yang melibatkan institusi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga publik yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat Sumatera Utara. Pemilihan sampel didasarkan pada relevansi isu, intensitas pemberitaan, serta keterkaitannya dengan kepentingan publik sehingga dapat merepresentasikan pola pembingkai yang digunakan oleh *Tribun Medan* (Moleong, 2019). Data utama penelitian ini terdiri atas 24 berita korupsi yang diterbitkan oleh *Tribun Medan* selama periode Januari 2024 hingga Maret 2025. Jumlah tersebut dipilih karena dinilai memadai untuk membaca kecenderungan konstruksi pemberitaan secara kualitatif, terutama pada berita yang memiliki kelengkapan unsur teks, keterkaitan dengan isu korupsi lokal, dan relevansi dengan empat elemen *framing* Robert N. Entman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Tahap dokumentasi dilakukan melalui penelusuran, pengunduhan, dan pengarsipan berita secara manual untuk menjaga keutuhan data, meliputi judul, *lead*, isi berita, sumber kutipan, dan elemen pendukung lainnya. Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan informan dari internal *Tribun Medan*, yaitu Editor Hukum dan Kriminal yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses produksi berita. Wawancara digunakan sebagai teknik triangulasi sumber untuk mengonfirmasi kesesuaian antara hasil analisis teks dengan pertimbangan redaksional dalam praktik jurnalistik (Susanto, 2021). Dalam penelitian ini, wawancara tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan pandangan redaksi, melainkan untuk memperkuat interpretasi terhadap hasil analisis teks yang ditemukan peneliti.

Instrumen analisis merujuk pada empat perangkat *framing* Robert N. Entman. Pertama, *define problems*, yaitu cara media mendefinisikan suatu peristiwa sebagai masalah. Kedua, *diagnose causes*, yakni identifikasi aktor, faktor, atau sistem yang diposisikan sebagai penyebab masalah. Ketiga, *make moral judgment*, yaitu bentuk penilaian moral yang diberikan media terhadap peristiwa dan aktor yang terlibat. Keempat, *treatment recommendation*, yaitu rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan dalam narasi pemberitaan (Paramita, 2024). Keempat perangkat tersebut disusun dalam matriks analisis untuk mengidentifikasi pola pembingkai secara sistematis. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks *framing*, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga *trustworthiness* penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis teks, hasil wawancara, dan dokumen pendukung yang relevan sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *framing* pada media online *Tribun Medan* dalam pemberitaan kasus korupsi di Sumatera Utara dilakukan dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Penelitian ini menganalisis sejumlah berita utama terkait korupsi yang dipublikasikan sepanjang periode 2024–2025 dan

melibatkan berbagai institusi publik, seperti Pemerintah Kota Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi pemberitaan yang dibangun oleh *Tribun Medan* dapat diidentifikasi melalui empat elemen utama *framing*, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Keempat elemen tersebut memperlihatkan bagaimana media mengonstruksi realitas korupsi, menentukan aktor yang dianggap bertanggung jawab, membangun penilaian moral, serta menawarkan solusi atas permasalahan yang diberitakan:

Pendefinisian Masalah (*Define Problems*)

Pada elemen *define problems*, *Tribun Medan* membingkai kasus korupsi tidak semata-mata sebagai persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat, hak-hak pihak ketiga, dan keberlangsungan fasilitas publik. Konstruksi tersebut tampak dalam pemberitaan berjudul “*NASIB Direktur Korupsi Uang Pembangunan Masjid Agung, Bikin Rugi Rp5,6 M, Vendor Protes tak Dibayar*”, yang menekankan konsekuensi sosial dari praktik korupsi selain aspek hukumnya. Fokus pemberitaan diarahkan pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak yang terdampak secara langsung, sehingga isu korupsi ditempatkan dalam konteks yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pembaca. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan media lokal untuk mengaitkan persoalan korupsi dengan realitas sosial masyarakat di wilayah pemberitaannya.



Gambar 1. Pemberitaan Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung pada *Tribun Medan*
Sumber: *Tribun Medan*, 24 Mei 2025.

Kecenderungan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengonstruksi realitas melalui penonjolan aspek-aspek tertentu yang dianggap memiliki nilai kedekatan dengan audiens. Dalam konteks ini, *Tribun Medan* menempatkan dampak sosial sebagai fokus utama pemberitaan untuk memperkuat relevansi isu korupsi bagi masyarakat lokal. Penonjolan kerugian sosial dan dampak terhadap kepentingan publik berfungsi untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus meningkatkan perhatian pembaca terhadap persoalan korupsi. Temuan ini mendukung argumentasi bahwa media sering kali menyoroti konsekuensi sosial suatu peristiwa guna membangkitkan empati dan keterlibatan publik terhadap isu yang diberitakan (Kurniati et al., 2025).

Identifikasi Penyebab (*Diagnose Causes*)

Pada elemen *diagnose causes*, *Tribun Medan* cenderung mengidentifikasi akar permasalahan korupsi sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan teknis dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis berskala besar. Konstruksi tersebut tampak dalam pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang–Langsa senilai Rp1,3 triliun, yang menekankan adanya pola penyimpangan sistematis melalui manipulasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyoroti kerugian negara sebagai akibat akhir, tetapi juga berupaya mengungkap mekanisme yang memungkinkan terjadinya tindak korupsi. Penekanan pada aspek proses dan pola penyimpangan memperlihatkan upaya media dalam mengarahkan perhatian publik pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut.



Gambar 2. Pemberitaan Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang–Langsa pada *Tribun Medan*
Sumber: *Tribun Medan*, 20 Januari 2024.

Melalui narasi yang dibangun, *Tribun Medan* menegaskan bahwa praktik korupsi terjadi akibat adanya keterlibatan sejumlah aktor yang menempati posisi strategis dalam birokrasi dan pelaksanaan proyek, sebagaimana ditunjukkan oleh penetapan enam tersangka oleh Kejaksaan Agung. Media ini secara konsisten mengarahkan identifikasi penyebab pada pemanfaatan celah regulasi, lemahnya pengawasan, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas dalam pengelolaan proyek publik. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa media daring sering membingkai penyebab korupsi sebagai kombinasi antara faktor individual berupa rendahnya integritas pelaku dan faktor institusional berupa kelemahan sistem pengawasan (Jufrizal et al., 2022; Sahbana et al., 2025). Konstruksi semacam ini menunjukkan bahwa *Tribun Medan* memosisikan korupsi sebagai persoalan yang bersifat personal sekaligus struktural, sehingga memerlukan perhatian terhadap perilaku aktor maupun tata kelola kelembagaan yang melingkupinya.

Penilaian Moral (*Make Moral Judgment*)

Pada elemen *make moral judgment*, *Tribun Medan* cenderung membangun penilaian moral melalui penonjolan reaksi sosial masyarakat terhadap tindakan korupsi yang dianggap merugikan kelompok

rentan. Pola tersebut terlihat dalam pemberitaan berjudul “*Pantas Warga Marah dan Bakar Rumah Lurah: Ketahuan Jual Beras Bansos 4 Ton Raup Rp36 Juta*”, yang menempatkan tindakan pelaku dalam kerangka moral yang negatif. Pemilihan diksi tertentu dalam judul dan isi berita menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat persepsi bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab publik. Konstruksi ini memperlihatkan bagaimana media membingkai kasus korupsi sebagai tindakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang bergantung pada bantuan sosial.



Gambar 3. Pemberitaan Dugaan Penyelewengan Bantuan Sosial oleh Aparatur Kelurahan pada *Tribun Medan*
Sumber: *Tribun Medan*, 19 Mei 2025.

Melalui penggunaan kata “Pantas” pada awal judul, *Tribun Medan* tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga membangun legitimasi moral terhadap kemarahan kolektif masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Bingkai moral yang dikonstruksikan memperhadapkan perilaku aparat kelurahan yang memperoleh keuntungan pribadi dengan hak masyarakat miskin sebagai penerima bantuan sosial. Konstruksi tersebut menempatkan tindakan koruptif sebagai bentuk penyalahgunaan amanah publik yang berdampak langsung pada kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara. Dalam konteks ini, pemberitaan *Tribun Medan* menunjukkan kecenderungan untuk menonjolkan dimensi etis dan kemanusiaan dari kasus korupsi, sehingga tindakan pelaku tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral seorang pemimpin.

Peneliti menilai bahwa praktik jurnalisme yang ditampilkan *Tribun Medan* dalam kasus ini mengandung unsur *public shaming*, yaitu memperlihatkan pelaku kepada ruang publik sebagai bentuk sanksi sosial atas perbuatannya. Tindakan korupsi dibingkai sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat yang berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemegang jabatan pemerintahan di tingkat lokal. Konstruksi tersebut membuat reaksi keras masyarakat direpresentasikan sebagai konsekuensi dari rusaknya integritas moral seorang pejabat publik. Secara teoretis, pemberian penilaian moral dalam teks berita berfungsi untuk membentuk sanksi sosial sebelum proses hukum mencapai putusan akhir (Kusumaningsih, 2024; Paramita, 2024). Melalui pemingkai ini, *Tribun Medan* tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun kerangka

interpretatif yang mendorong publik untuk mengevaluasi dan menolak perilaku koruptif berdasarkan pertimbangan moral.

Saran Penanggulangan (*Treatment Recommendation*)

Rekomendasi yang tersirat maupun tersurat dalam pemberitaan *Tribun Medan* umumnya mengarah pada dua aspek utama, yaitu penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu dan peningkatan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Tribun Medan* secara konsisten mengawal perkembangan proses hukum kasus korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, sehingga membangun pesan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan tindakan hukum yang tegas dan membenahan birokrasi melalui mekanisme yudisial. Media ini tidak hanya menempatkan korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola yang membutuhkan perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan. Pola pembingkaiannya tersebut menunjukkan peran media dalam mendorong akuntabilitas publik dan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristik ini sejalan dengan fungsi jurnalisme pembangunan yang menekankan pentingnya pengawasan media sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pemerintahan.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Editor Hukum dan Kriminal *Tribun Medan* yang terlibat langsung dalam proses penyuntingan berita korupsi di Sumatera Utara guna memvalidasi temuan *framing* yang diperoleh dari analisis teks. Wawancara tersebut menguji kesesuaian antara konstruksi pemberitaan dengan kebijakan redaksional yang diterapkan dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Informan menjelaskan bahwa redaksi secara sadar menentukan pilihan diksi, penekanan judul, dan sudut pandang pemberitaan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak korupsi. Redaksi juga berupaya membangun efek jera melalui pemberitaan yang menonjolkan konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan koruptif. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya konsistensi antara konstruksi *framing* yang ditemukan dalam teks berita dengan orientasi redaksional *Tribun Medan* dalam mengawal isu korupsi di tingkat lokal.

Tabel 1 Hasil Wawancara Informan dalam Triangulasi Data

Jabatan Informan	Pertanyaan	Pernyataan
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Bagaimana redaksi menentukan sudut pandang berita korupsi?	"Kami memang tidak hanya menyampaikan fakta hukum, tapi juga berusaha memilih <i>angle</i> yang bisa menyentuh masyarakat, terutama dengan menonjolkan dampak langsung kepada warga."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Mengapa dampak sosial sering ditonjolkan dalam berita?	"Supaya pembaca memahami bahwa korupsi itu bukan sekadar angka kerugian negara, tetapi ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Bagaimana proses penulisan judul berita korupsi?	"Dalam penulisan judul, kami mempertimbangkan aspek edukasi dan efek jera agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya korupsi."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Apakah ada strategi tertentu dalam pemilihan diksi?	"Ada penekanan diksi tertentu supaya pesan lebih kuat, tetapi tetap kami jaga agar tidak keluar dari koridor jurnalistik."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Bagaimana posisi media dalam memberikan penilaian moral?	"Kami tidak secara langsung menghakimi, tetapi <i>framing</i> yang kami bangun memang mengarah pada pembentukan opini publik terhadap pelaku."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Apa peran media lokal dalam kasus korupsi daerah?	"Sebagai media lokal, kami merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan di Sumatera Utara."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Apakah pemberitaan juga berfungsi sebagai kontrol sosial?	"Pemberitaan korupsi bagi kami bukan hanya soal berita, tetapi bagian dari kontrol sosial terhadap institusi publik."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Bagaimana menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kualitas berita?	"Kami tetap berusaha menjaga kedalaman informasi meskipun ada tuntutan kecepatan dalam media online."

Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Apakah tekanan <i>traffic</i> memengaruhi <i>framing</i> berita?	"Tekanan <i>traffic</i> memang ada, tetapi kami tetap berupaya menjaga nilai edukatif dalam setiap pemberitaan."
Editor Hukum & Kriminal <i>Tribun Medan</i>	Bagaimana kebijakan redaksi dalam mengawal kasus korupsi?	"Kami secara konsisten mengawal proses hukum dan transparansi agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *framing* yang dibangun oleh *Tribun Medan* tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari kebijakan redaksional yang dirancang secara sadar dan sistematis. Redaksi secara aktif menentukan aspek-aspek tertentu yang perlu ditonjolkan dalam pemberitaan untuk membangun pemahaman publik mengenai dampak korupsi terhadap masyarakat dan institusi pemerintahan. Temuan ini memperkuat hasil analisis teks yang menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga mengonstruksi realitas melalui proses seleksi, penekanan, dan interpretasi informasi. Proses tersebut memungkinkan media membentuk cara pandang audiens terhadap isu korupsi sesuai dengan sudut pandang yang dikembangkan dalam pemberitaan. Temuan ini selaras dengan model *framing* Robert N. Entman yang menjelaskan bahwa media secara aktif memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas untuk memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa.

Analisis terhadap pemberitaan korupsi di *Tribun Medan* menunjukkan bahwa keempat perangkat *framing* Entman hadir secara konsisten dalam konstruksi berita yang dianalisis. Pada aspek *define problems*, media mendefinisikan korupsi sebagai persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik dan kualitas pelayanan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara. Pada aspek *diagnose causes*, pemberitaan mengarahkan perhatian pada lemahnya pengawasan, penyalahgunaan kewenangan, dan keterlibatan aktor tertentu dalam struktur birokrasi sebagai faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Aspek *make moral judgment* tampak melalui penonjolan konsekuensi sosial dan moral yang ditimbulkan oleh tindakan koruptif, sedangkan aspek *treatment recommendation* diwujudkan melalui dorongan terhadap penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi publik, dan penguatan sistem pengawasan sebagai langkah pencegahan korupsi di masa mendatang. Pola pembingkaiannya menunjukkan bahwa *Tribun Medan* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kasus korupsi, tetapi juga membangun kerangka interpretatif yang membantu publik memahami penyebab, dampak, dan alternatif penyelesaian atas persoalan tersebut.

Integrasi antara analisis teks berita dan hasil wawancara mengonfirmasi bahwa *Tribun Medan* menjalankan fungsi *watchdog journalism* dalam mengawasi berbagai kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara. Melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa, media mengarahkan perhatian audiens pada isu-isu yang dianggap penting untuk memperoleh respons publik sekaligus memperkuat fungsi edukasi dan kontrol sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Entman bahwa *framing* merupakan proses memilih sebagian aspek realitas dan menjadikannya lebih menonjol dalam teks komunikasi untuk mendorong definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian tertentu. Meskipun industri media digital menghadapi tuntutan untuk meningkatkan jumlah pembaca dan lalu lintas kunjungan (*traffic*), *Tribun Medan* tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kecepatan publikasi dan kedalaman informasi yang disajikan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberitaan korupsi di *Tribun Medan* tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan mencerminkan strategi redaksional yang bertujuan membangun kesadaran publik, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong pengawasan terhadap institusi negara melalui pemberitaan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Tribun Medan* mengonstruksi korupsi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik. Melalui empat perangkat *framing* Robert N. Entman, media membangun definisi masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan evaluasi moral, dan mengarahkan solusi yang menekankan penegakan hukum serta transparansi birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa media lokal tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk pemaknaan publik terhadap korupsi melalui praktik *watchdog journalism*. Kajian ini memperkuat argumentasi bahwa karakteristik media lokal dalam lingkungan jurnalisme digital berpengaruh terhadap cara realitas korupsi dikonstruksi dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis pemberitaan satu media lokal dan melibatkan informan yang berasal dari lingkungan redaksi yang sama, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keragaman perspektif dalam konstruksi pemberitaan korupsi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa media lokal dan nasional, serta melibatkan akademisi, praktisi media, maupun audiens sebagai sumber data tambahan. Pengembangan penelitian juga dapat diarahkan pada analisis penerimaan khalayak (*audience reception*) untuk memahami bagaimana publik menafsirkan *framing* korupsi yang dibangun media dalam konteks jurnalisme digital.

REFERENSI

- Ainani, M., & Hamdie, N. T. A. (2025). Analisis Komparatif Framing Media Lokal dan Nasional pada Kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 7(2), 321–337. <https://doi.org/10.24076/pikma.v7i2.2002>
- Ariansyah, M. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Thomas Lembong pada Media Online Kompas.Com. *Komsospol*, 5(2), 120–127. <https://doi.org/10.47637/KOMSOSPOL.V5I2.2035>
- Bungsu, A. P., & Muzakir, F. (2023). Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate. *Journal of Da'wah*, 2(1), 132–149. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>
- Damarrosydi, A. A. (2025). Media Framing dalam Pemberitaan Intimidasi terhadap Jurnalis. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(02), 241–248. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/1777>
- Jufrizal, J., Karerek, K., & Jamali, Y. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan tentang Isu Korupsi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 479–484. <https://doi.org/10.32923/KJMP.V5I2.3465>
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., Barokah, A., & Saryono, S. (2025). Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62–69. <https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2289>
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan. *Jishum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>
- Moleong, J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 286. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.37095>
- Paramita, A. S. (2024). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Media Online Lampost.Co*. Universitas Lampung.
- Puanandini, D. A., Khaerun, W., Putri, N., & Zaelani, N. (2025). Fenomena Lemahnya Penerapan Prinsip Efek Jera dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(3), 1032–1040.

<https://doi.org/10.31604/JIPS.V12I3.2025.1032-1040>

- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2024). Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>
- Ramadhani, R. P. (2024). *Peran, Media Sosial, Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah*. Universitas Jambi.
- Rasiwan, I. (2025). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan*. AMU Press.
<https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/602>
- Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G. (2025). Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 31–38.
<https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/175>
- Setiawan, H., & Harnia, N. T. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Vonis Koruptor pada Media Online Suara.com dan KOMPAS.com. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 11(4), 473. <https://doi.org/10.23887/jipbs.viii4.41136>
- Siregar, A. (2025). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Kompas.Com dan Metrotvnews.Com dalam Isu Politik Terhadap Polarisasi Pemilih dalam Pemilu 2024 (Edisi Januari 2024)*. IAIN Curup.
- Sofiati, N., & Yusuf, H. (2025). Fenomena Korupsi Kepala Daerah di Sumatera Utara: Analisis Kasus Gubernur dan Upaya Pencegahan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Agustus), 6102–6110. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/754>
- Sovianti, R. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 1(1). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/239>
- Suryasuciramdhan, A., Meliasari, M., Ifada, B. M., & Faidh, M. A. (2024). Analisis Framing dalam Kasus Penyalahgunaan KIP Kuliah Mahasiswi Universitas Diponegoro di Media Sosial X dan Media Online Kompas.Tv. *Journal of Creative Student Research*, 2(3), 40–51.
<https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i3.3824>
- Susanto, E. (2021). Independensi Media Tempo dan Pengaruh Ekonomi Politik dalam Praktik Strukturasi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 24–38.
<https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i1.1314>